

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Pengetahuan



GTPP DENPASAR SIAPKAN ANTISIPASI LONJAKAN COVID-19



GUBERNUR KOSTER MATANGKAN RENCANA PUSAT KEBUDAYAAN BALI Hal. 2

BADUNG PASANG "POJOK WI-FI" PADA 33 TITIK OBJEK WISATA

Hal. 9



HAL 5

Gubernur Koster Matangkan Rencana Pusat Kebudayaan Bali

Gubernur Bali Wayan Koster memantapkan rencana pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan melakukan konsultasi publik bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat dan pemangku kepentingan terkait.

“Secara konsep perencanaan, ada tiga konsep yaitu konsep utama pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan merencanakan tempat yang dapat menjadi inventarisasi warisan Kebudayaan masa lalu diintegrasikan dengan kebutuhan pengetahuan dan teknologi masa kini, dan masa yang akan datang, sehingga nilai-nilai luhur budaya dapat terwarisi secara berkelanjutan,” kata Koster dalam acara konsultasi publik di Semarapura, Klungkung, Senin.

Dalam pemaparannya, Koster menjelaskan kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang berlokasi di Eks Galian C Gunaksa, Kabupaten Klungkung ini semula merupakan wilayah yang rusak, tergenang dan terbengkalai.

Hal itu karena setelah Gunung Agung di Kabupaten Karangasem pada tahun 1963 meletus, menjadikan lahan persawahan yang subur tersebut tertutup aliran lahar dingin Gunung Agung lebih dari 300 hektare.

Untuk mewujudkan Pusat Kebudayaan Bali, pihaknya melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah melakukan penetapan lokasi kawasan pembangunan dengan luas mencapai 334,62 hektare yang terdiri dari Pemukiman Desa Tangkas Eksisting sebanyak 11,19 hektare, Penetapan Lokasi (Penlok) Tahap I seluas 110,31 hektare, dan Penlok Tahap II dengan luas 213,12 hektare.

Dalam pembangunan Pusat



Gubernur Bali Wayan Koster dalam konsultasi publik kawasan Pusat Kebudayaan Bali (Antaraneews Bali/HO Pemprov Bali/2020)

Kebudayaan Bali, lanjut Koster, juga terdapat konsep edukasi, konservasi, rekreasi, dan pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan dan pembangunan terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Kemudian ada juga konsep infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan, dengan adanya perhubungan darat (jalan, kereta LRT dan ART), Perhubungan Laut

(Pelabuhan Gunaksa, Marina), dan pengembangan infrastruktur yang aman dan ramah lingkungan.

Koster menambahkan, di setiap pembangunannya juga akan selalu berpedoman pada ajaran Trisakti Bung Karno yakni Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam bidang Kebudayaan. (ant)

Wagub: "Gerakan Bali KemBali" Kampanyekan Protokol Kesehatan Pada Masyarakat



Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menghadiri Deklarasi Gerakan Bali KemBali (Antaraneews Bali/Dok Pemprov Bali/2020)

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengharapakan “Gerakan Bali KemBali” dapat menjadi ajang promosi dan kampanye mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat di Pulau Dewata.

“Gerakan ini kami harapkan memberikan dampak positif bagi pariwisata di Bali terutama bagi masyarakat Bali pada era setelah

pandemi,” kata Wagub Bali yang akrab dipanggil Cok Ace itu saat menghadiri Deklarasi Gerakan Bali KemBali di Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (15/11) malam.

Cok Ace menyampaikan apresiasi atas deklarasi tersebut yang menunjukkan semangat dari kita semua untuk bangkit kembali dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi COVID-19

Diapun sangat mengapresiasi visi dan misi dari Gerakan Bali KemBali ini, karena secara tidak langsung akan dapat memulihkan perekonomian Bali.

“Gerakan Bali kemBali sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai penanggulangan dan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat. Selain itu, gerakan ini juga menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata Bali yang telah siap menjalankan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan gerakan ini adalah untuk memulihkan perekonomian Bali setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

“Gerakan ini mengajak masyarakat Bali untuk bangkit, jangan terus terpuruk oleh situ-

asi ini,” ucap birokrat yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali itu.

Dewa Indra menambahkan, dengan adanya gerakan ini didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 yang baik pula, maka hal ini akan menimbulkan kepercayaan bagi wisatawan baik itu wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berwisata ke Bali.

Deklarasi Gerakan Bali KemBali juga turut dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Aminudin Ma’ruf, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatib, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Ketua GIPI Bali/Bali Tourism Board serta undangan lainnya. (ant)

Putri Koster Ajak Pelajar Tanamkan Jiwa Nasionalisme

KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengajak para pelajar agar senantiasa menanamkan jiwa nasionalisme dan bersemangat dalam menuntut ilmu.

"Satu detik pun, jangan pernah terbersit dalam pikiran untuk menghancurkan negeri ini. Jangan mau terhasut oleh apapun," kata Putri Koster, di Kediaman Jayasabha, Denpasar, Rabu.

Menurut dia, semangat nasionalisme tidak boleh hilang dalam diri setiap anak bangsa karena hal itu merupakan modal bagi upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Upaya menanamkan loyalitas dan dedikasi pada Tanah Air dapat dilakukan melalui banyak hal, salah satunya karya sastra, seperti puisi," ucapnya pada kegiatan bertajuk "Bali Virtual Field Trip Sekolah Dian Harapan, Lippo Village Tangerang" melalui aplikasi

Microsoft Teams" itu.

Istri Gubernur Bali itu mencontohkan puisi berjudul "Sumpah Kumbakarna" karya Denok Kristianti sebagai mahakarya yang sangat aktual dibaca dan dijadikan bahan perenungan.

"Puisi Sumpah Kumbakarna memiliki makna mendalam, yang mengingatkan siapa saja untuk mencintai dan membela negaranya tanpa syarat. Seperti yang dilakukan tokoh Kumbakarna, meskipun tidak setuju dengan perbuatan kakaknya Rahwana yang menculik Dewi Sinta, namun ketika Kerajaan Alengka diserbu pasukan Sri Rama, dengan langkah kesatria, Kumbakarna pasang badan untuk membela negaranya," ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster saat menyampaikan sambutan secara virtual (Antaraneews Bali/HO-Pemprov Bali/2020)

Putri Koster menyambut baik pelaksanaan wisata virtual Sekolah Dian Harapan, Lippo Village Tangerang. Ia menyebut kegiatan itu sebagai ide kreatif di tengah pandemi COVID-19.

Kesempatan itu dimanfaatkan untuk lebih memperkenalkan Bali kepada siswa Sekolah

Dian Harapan. "Sebelum bisa berkunjung secara langsung ke Bali, adik-adik bisa lebih mengenal dulu secara virtual. Pahami dulu tentang Bali, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang," ujarnya.

Wisata virtual Sekolah Dian Harapan ke Bali dirancang sedemikian rupa sehingga 95 anak yang mengikuti dari rumah masing-masing merasa diajak langsung menjelajahi sejumlah tempat di Bali. (ant)



Sekda Bali Apresiasi Survei Pengolahan Sampah Jadi Listrik



Asisten Pemrov Bali Made Wiratmi saat membacakan sambutan Sekda Bali Dewa Made Indra (Antaraneews Bali/Dok Pemprov Bali/2020)

SEKRETARIS Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi kegiatan peninjauan minat pasar (survei) terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

"Sampai saat ini pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang belum bisa ditangani secara tuntas," kata Sekda Bali dalam sambutannya

yang dibacakan oleh Asisten Pemrov Bali Made Wiratmi, di Denpasar, Jumat (20/11).

Dia menambahkan, produksi sampah yang terus menerus meningkat, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pengolahan sampah.

"Setiap hari volume sampah semakin meningkat, penanganan sampah tidak akan selesai jika hanya diserahkan kepada pemerintah. Perlu langkah bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, karena masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan bertanggung jawab pada rantai pertama persoalan," ujarnya.

Menurut dia, perlu membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan sampah, melalui langkah yang paling mudah tentunya tidak membuang sampah di sembarang tempat, melakukan pemilahan dan melakukan pengolahan sampah mulai dari sumber.

Pemerintah Provinsi Bali dengan Visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" ingin mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-

niskala, salah satu misinya dengan "Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah dan Lingkungan yang Hijau, Indah dan Bersih,"

Untuk itu, dalam hal rencana penanganan sampah, Pemerintah Provinsi Bali akan merencanakan pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang merupakan program percepatan revitalisasi TPA Sarbagita dan sekaligus mencari solusi volume sampah yang masuk ke TPA Regional Sarbagita sebesar ± 1150 ton/hari.

Sampah tersebut berasal dari empat Kabupaten yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar. Rencana pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) TPA Regional Sarbagita diharapkan mampu memusnahkan sampah yang kondisi saat ini sudah overload. (ant)

Komisi X DPR Berkunjung ke Denpasar Untuk Pemulihan Pariwisata

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan kunjungan kerja ke pemerintah kota Denpasar, Provinsi Bali guna mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng Pramestuti di Denpasar, Jumat, mengatakan kunjungan kerja di masa reses anggota Dewan guna mengetahui perkembangan Pemkot Denpasar di tengah pandemi, dan upaya-upaya dilakukan memulihkan sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali.

Ia mendukung upaya pemerintah daerah memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, anggota Komisi X DPR ke Kota Denpasar guna menggali, menyerap aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah, termasuk pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Di tengah pandemi COVID-19,



kondisi pariwisata Indonesia sangat terpuruk. Kami perlu mendapatkan gambaran dan data mengenai kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Bali khususnya Denpasar kami yang bergantung pada kehidupan pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya.

Terpuruknya pariwisata, sehingga negara kehilangan banyak devisa dari pariwisata, khususnya Bali sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia dengan adanya hantaman pandemi COVID-19 sangat merasakan dampaknya.

Sementara Pjs. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayai Bali khususnya Denpasar dalam membantu pemulihan pariwisata



Komisi X DPR berkunjung ke Denpasar terkait pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

dan ekonomi kreatif. Hal ini mengingat sektor ekonomi kreatif dapat menjadi sektor andalan baru untuk mendukung kemajuan pariwisata berkelanjutan.

"Pemkot Denpasar memiliki Dharma Negara Alaya Art and Creative Hub sebagai ruang berkegiatan termasuk menciptakan start up bussines bagi anak muda yang dapat membantu menghidupkan perekonomian

kota. Karena Kota Denpasar adalah pusat bergeraknya sektor perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Untuk itu salah satu event Denpasar Festival 2020 merupakan sebagai ruang bagi insan ekonomi kreatif di Denpasar untuk mengeksplorasi diri, dan kami siap untuk berkolaborasi saling memperkenalkan potensi daerah dan bertukar ide kreatif," kata Made Toya. (ant)

Dispar Denpasar Kumpulkan Data Hibah Pariwisata



Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Denpasar, Dezire Mulyani. (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

DINAS Pariwisata Kota Denpasar, Provinsi Bali melakukan proses dan pengumpulan berkas atau data terkait bantuan stimulus dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif berupa dana hibah pariwisata tahun 2020.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Denpasar, Dezire Mulyani saat dikonfirmasi di Denpasar,

Selasa, menjelaskan proses realisasi dana hibah pariwisata tahun 2020 yang digelontorkan Kemenparekrif merupakan sebuah upaya untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang mengalami gangguan finansial akibat pandemi COVID-19.

"Harapannya, sektor yang menjadi tulang punggung pereko-

nomian di Bali itu dapat tumbuh dan berkembang serta bangkit kembali," katanya.

Ia mengatakan sebagai upaya untuk memaksimalkan realisasi dan serapan bantuan stimulus pariwisata, masa pengumpulan berkas dilaksanakan perpanjangan waktu. Yang sedianya dijadwalkan pada 10-12 November diperpanjang hingga kini.

Dezire mengatakan terdapat empat kriteria yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hibah pariwisata tahun 2020, yakni pertama, hotel dan restoran sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019.

Kedua, hotel dan restoran masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan hibah pariwisata pada bulan Agustus 2020. Ketiga, hotel dan restoran memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku. Keempat, hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran

PHR pada tahun 2019.

"Perpanjangan masa pemberkasannya ini dimaksudkan untuk memaksimalkan realisasi dan serapan bantuan hibah pariwisata ini tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh pelaku industri pariwisata," ujarnya.

Menurut Dezire, pelaku usaha industri pariwisata yang memenuhi syarat untuk segera melengkapi dokumen persyaratan dimaksud. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung maksimalnya realisasi dan serapan hibah di masyarakat.

"Untuk hotel dan restoran yang sampai saat ini belum mengumpulkan dokumen dimiliki sesuai kriteria sesuai penerimaan hibah diharapkan segera menyampaikan kepada Dinas Pariwisata Kota Denpasar, serta bagi pelaku industri yang belum memiliki TDUP, NIB agar segera melaksanakan pengurusan di DPMPSTP Kota Denpasar," ujarnya. (ant)

GTPP Denpasar Siapkan Antisipasi Lonjakan COVID-19

TIM Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Denpasar, Provinsi Bali menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama jajaran internal sebagai upaya mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19.

“Perkembangan COVID-19 di Kota Denpasar cenderung bergerak fluktuatif, sehingga kita tidak boleh lengah, saat ini GTPP bersama seluruh jajaran hingga lapisan terbawah merancang langkah taktis sebagai upaya untuk fokus menekan angka penularan, menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan pasien,” kata Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan untuk menyikapi kondisi tersebut ada beberapa langkah yang sudah dan akan ditempuh. Yakni menggenarkan serta memaksimalkan penerapan 3 T (test, tracing and treatment). Penerapan ini juga sejalan dengan arahan Satgas



COVID-19 Nasional sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penularan COVID-19.

“Selain itu penegakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan semakin digencarkan di daerah dengan tingkat penyebaran kasus yang tidak terkendali. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan menggunakan mobil calling atau door to door, serta melaksanakan penyemprotan disinfektan wilayah secara terpadu,” kata Rai Mantra didampingi Ketua Harian GTPP COVID-19 Kota Denpasar Made Toya.

“Tentunya juga kami berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat agar ikut andil menjadi panutan dalam penerapan 3 M atau disiplin penerapan protokol kesehatan di masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Pjs. Sekda Kota Denpasar yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP)



Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra (kiri) memberi arahan pada rapat tim GTPP Denpasar merancang langkah antisipasi lonjakan COVID-19. (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

COVID-19 Kota Denpasar, I Made Toya menambahkan bahwa GTPP juga mewanti-wanti masyarakat yang hendak melaksanakan upacara adat dan keagamaan agar menerapkan protokol kesehatan.

Ia mengatakan GTPP pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, namun demikian pelaksanaan wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Sehingga pelaksanaan upacara adat dan keagamaan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

“Selalu melakukan 3 M (cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), Hindari 3 R (ramai-ramai, rumpi-rumpi dan ruang sempit). Jadi ini merupakan upaya untuk menekan penularan yang bermula pada menurunnya kasus secara akumulatif,” ujarnya. (ant)

Tim Yustisi Denpasar Jaring 17 Pelanggar Protokol Kesehatan



Tim Yustisi Denpasar jaring 17 orang langgar protokol kesehatan. (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

Tim Gabungan Yustisi Denpasar, Provinsi Bali menjangking sebanyak 17 orang yang melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan operasi penertiban disiplin dan penegakan

hukum protokol kesehatan di kawasan Ubung Kaja.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga di Denpasar, Senin, mengata-

kan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020, maka para pelanggar tersebut dikenakan sanksi.

Ia mengatakan dari 17 orang yang melanggar aturan protokol kesehatan (prokes), sebanyak 12 orang didenda di tempat sebesar Rp100 ribu karena tidak menggunakan masker, dan lima orang lagi diberikan pembinaan karena tidak menggunakan masker kurang sempurna.

“Sesuai dengan Pergub Bali yang tidak menggunakan masker dalam operasi tersebut maka didenda di tempat sebesar Rp100 ribu,” katanya.

Ia mengatakan langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19, maka berkewajiban melakukan

pembinaan, sosialisasi dan edukatif untuk dapat menggugah atau mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih atau sehat.

Lebih lanjut Dewa Sayoga mengatakan pencegahan penularan COVID-19 dibutuhkan partisipasi atau kesadaran masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka pelanggaran tidak akan ada lagi, sehingga pencegahan penularan COVID-19 segera bisa diatasi.

“Kami berharap masyarakat agar mengikuti aturan protokol kesehatan, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir di muka bumi ini, sehingga kehidupan pun dapat normal kembali,” katanya. (ant)

Badung Terima Penghargaan Kemenkeu Raih WTP Enam Kali Berturut-turut

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menerima penghargaan berupa plakat khusus dari Kementerian Keuangan setelah mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam kurun waktu enam tahun berturut-turut sejak 2014.

Plakat khusus tersebut diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin.

Selain menerima penghargaan plakat karena berhasil mempertahankan opini WTP, Kabupaten Badung juga menerima piagam WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.

Tri Budhianto menjelaskan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut artinya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik.

"Dimana tidak hanya keuangan

dan asetnya saja, tapi semakin baik pula fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah karena setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dan manfaat untuk masyarakat," ungkapnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, bahwa dalam situasi darurat karena pandemi COVID-19, kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting

"Namun kecepatan bertindak dan mengambil keputusan tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan yang baik," ujar Tri Budhianto.

Sementara itu, Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana mengatakan, bahwa LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk kewajiban konstitusional



Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana (kanan) didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata (tengah) saat menerima penghargaan dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto di Puspem Badung, Senin (16/11/2020). ANTARA/Humas Badung/fik

serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurutnya, Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun Anggaran 2019 juga disusun dengan informasi yang relevan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Selain itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem

Pengendalian Intern, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Ia mengaku bersyukur karena berkat kerja keras dan sinergi yang terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah dan bertepatan dengan perayaan HUT ke-11 Kota Mangupura, pihaknya berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. (adv)

29.979 UMKM di Badung Daftar Jadi Calon Penerima BPUM



Pelaku UMKM di Kabupaten Badung melakukan proses pendaftaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

SEBANYAK 29.979 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Badung, tercatat sebagai pendaftar Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk mendapatkan bantuan masing-masing senilai Rp2,4 juta.

"Per hari ini, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Badung yang melakukan pendaftaran mencapai 29.979 pelaku UMKM. Namun data tersebut belum final, data pendaftar masih bersifat dinamis," ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kabupaten Badung Made Widiana di Badung, Selasa.

Ia mengatakan jumlah calon penerima BPUM di wilayah Badung tersebut sudah diajukan ke Kementerian Koperasi untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Melalui BPUM, tambah dia, pemerintah ingin membantu pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM layak mendapatkan bantuan hibah ini.

Sejumlah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan ini diantaranya adalah pengusaha mikro tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan atau unbankable.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mempunyai Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul dan bukan berasal dari anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD.

Nantinya, pelaku UMKM yang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak menerima bantuan akan dibuatkan rekening oleh salah satu bank penyalur antara lain PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

"Pihak bank akan memanggil penerima untuk dibuatkan rekening dan nantinya akan menandatangani self declaration soal kelayakan menerima," kata Made Widiana. (adv)

Badung Berikan Dana Pariwisata Ke 1.065 Hotel dan 345 Restoran

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, menetapkan 1.065 hotel dan 345 restoran di wilayah tersebut menerima dana hibah pariwisata dari pemerintah pusat.

"Penerima hibah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 67/054/HK/2020 tentang Penetapan Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 ini kami harapkan agar segera melengkapi persyaratan administrasi sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujar Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana di Badung, Bali, Rabu.

Ia mengatakan, sesuai basis data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Badung, termasuk juga di Dinas Pariwisata Badung, jumlah data wajib pajak (WP) hotel di kabupaten itu sebanyak 3.351 hotel.

"Dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis sebanyak 1.065 hotel. Yang

sudah melengkapi berkas adalah 480 usaha hotel, yang belum melengkapi persyaratan 585 usaha. Yang belum melengkapi persyaratan, kami mendorong agar secepatnya bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan," katanya.

Ketut menjelaskan, dari 480 usaha tersebut, setelah menyeteror berkas dan saat ini yang sudah di-review inspektorat sebanyak 478 usaha. Dari hasil review terdapat 119 hotel berkasnya dikembalikan karena persyaratannya belum lengkap.

"Bukan berarti ini dia tidak dapat, namun karena belum lengkap dan segera mohon dilengkapi," ucap Ketut Lihadnyana.

Sementara itu, dari basis data wajib pajak restoran Tahun 2019, ada 1.846 usaha restoran. Dari hasil verifikasi yang memenuhi syarat ada sebanyak 345 restoran.

"Dari jumlah tersebut, yang sudah melengkapi berkas 186 usaha, sedangkan yang belum



Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana (kiri) didampingi Plt. Kadis Pariwisata Cok Raka Darmawan memberi keterangan di Puspem Badung, Rabu (18/11). Antara-antarenews Bali/HO-Humas Badung/fik

159, dimana ini juga di-review oleh inspektorat. Dari hasil review inspektorat, yang dikembalikan adalah 74 usaha yang harus segera melengkapi kekurangan atas persyaratan yang ditentukan," ucapnya.

Ketut Lihadnyana menambahkan, dari total anggaran yang

diterima, yaitu Rp948 miliar, 70 persennya atau senilai Rp663 miliar akan diberikan untuk pelaku usaha hotel dan restoran. Sisanya sebesar 30 persen akan digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah yang menyangkut masalah keamanan, kebersihan, kesehatan dan lingkungan. (adv)

Pemkab Badung Siap Ikuti Penilaian "Paritrana Award" BPJS Ketenagakerjaan



Persiapan Paritrana Award oleh Pemkab Badung. ANTARA/HO-Humas Badung

PEMERINTAH Badung Provinsi Bali siap mengikuti penilaian dalam rangka pengumuman penghargaan "Paritrana Award" dari BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2020.

"Kami menyambut baik penilaian Paritrana Award tahun ini. Untuk itu kami harap dapat bersama-sama menyongsong penilaian ini dengan persiapan

yang matang sehingga dapat meraih hasil yang lebih baik," ujar Plt Asisten I Pemkab Badung Gede Wijaya di Mangupura, Rabu.

Penghargaan Paritrana Award merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan yang digelar setiap tahun dimulai tahun 2017. Kompetisi tersebut dibagi menjadi lima kandidat yaitu kandidat pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, perusahaan skala besar, perusahaan skala menengah dan usaha kecil-mikro.

Dalam rentang waktu 30 hari ke depan, Pemkab Badung akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah dokumen tersebut terkumpul, kandidat dari Badung akan diajukan ke tingkat provinsi.

Nantinya, di tingkat provinsi ada tim sembilan yang akan menyeleksi dan menentukan dua kabupaten/kota yang berhak diajukan ke pusat untuk bersaing dengan daerah lain seluruh Indonesia.

Terkait hal itu, Gede Wijaya mengatakan dalam kurun waktu sebulan ke depan, pihaknya berharap perangkat daerah terkait dapat mempersiapkan dokumen sekaligus menunjuk kandidat yang akan diajukan sehingga dapat memastikan langkah yang dilakukan sesuai dengan indika-

tor penilaian.

"Harapan pemerintah dari penilaian ini akan lebih mendorong setiap pemberi kerja untuk dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya dalam hal ini jaminan sosial tenaga kerja," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Badung Nurul Indahyati menjelaskan Paritrana Award atau penghargaan perlindungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari pemerintah dan pemberi kerja akan pentingnya jaminan sosial karena masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya.

"Pemerintah berperan penting dalam menerbitkan regulasi, sedangkan pemberi kerja juga berperan penting melalui komitmennya mendaftarkan seluruh tenaga kerja," ujarnya. (adv)

Badung Adakan Upacara Ngaben Tikus untuk Bersihkan Hama Pertanian

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, melakukan ritual upacara 'Ngaben Bikul' atau tikus sebagai salah satu upaya untuk memohon agar wilayah tersebut bersih dan bebas dari hama yang menyerang tanaman petani.

"Upacara Ngaben Bikul (tikus) ini mengandung nilai kearifan lokal dan juga nilai filosofi yang menyangkut aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia," ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa saat puncak Upacara Ngaben Bikul di Pantai Seseh, Badung, Kamis.

Ia mengatakan, aspek kehidupan manusia tersebut yang pertama dapat dilihat dari aspek lingkungan. Pelaksanaan Ngaben Bikul bertujuan untuk membersihkan hama tanaman dan juga menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk dari aspek niskala (rohani).

"Apabila dicermati lebih jauh tradisi ini tentunya sangat

membantu dalam hal menjaga keseimbangan ekosistem lahan pertanian," katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan, upacara Ngaben Bikul dilakukan juga sebagai wujud keberpihakan Pemkab Badung pada sektor pertanian, terlebih saat ini Badung menjadi daerah yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19, karena sebelumnya Badung sangat mengandalkan sektor pariwisata.

"Melalui upacara Ngaben Bikul ini, kami pemerintah daerah berupaya mewujudkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Badung," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Upacara Ngaben Bikul, I Gede Arjana menjelaskan, upacara tersebut dilaksanakan karena adanya wabah tikus di lahan pertanian Kabupaten Badung.

"Hari ini kami melaksanakan upacara Ngaben Bikul agar alam



Puncak Upacara Ngaben Bikul di Pantai Seseh, Badung, Kamis (19/11). ANTARA/HO-Humas Badung/fik

ini utamanya di wewidangan (wilayah) subak bisa harmonis. Diharapkan dengan adanya upacara ini, Badung kembali harmonis, rahayu dan rahajeng," terangnya.

Sebelum puncak upacara ngaben, lada Rabu (18/11) lalu,

dilakukan upacara 'ngeringkes bangkai bikul' yang bermakna menyucikan tikus. Pada proses tersebut, tikus dipilih sesuai jenis kelaminnya, setelah itu dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan dan diberikan aksara suci. (adv)

KKP Tingkatkan Kemampuan Poklahsar Badung Olah Turunan Mangrove



Peserta pelatihan mengolah turunan mangrove untuk Kelompok Poklahsar Wana Lestari di Kawasan Kampung Kepiting Tuban, Badung. ANTARA/HO-Humas Badung/fik

DIREKTORAT Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melaksanakan program pelatihan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas produksi produk olahan turunan mangrove bagi Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) di Kabupaten Badung, Bali.

"Untuk Badung pada tahun 2020 ini mendapatkan porsi pelatihan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memproduksi produk olahan turunan mangrove seperti sirup, dodol, keripik dan kopi," ujar Kepala Dinas Perikanan Badung I Nyoman Suardana dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Rehabilitasi Kawasan Mangrove KKP tersebut sebenarnya memiliki sejumlah program yang dilaksanakan meliputi penanaman mangrove, pembangunan nursery/pusat pembibitan mangrove, pembangunan sarana ekowisata tracking mangrove serta pemanfaatan produk olahan mangrove.

Pelatihan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memperkenalkan produk olahan mangrove sebagai salah satu upaya dalam pelestarian ekosistem mangrove sekaligus mendorong usaha ekonomi kreatif baru bagi masyarakat pesisir.

"Kabupaten Badung memiliki potensi ekosistem mangrove berupa avicenia, bruguiera dan rizhopora yang cukup melimpah

sehingga dipilih sebagai lokasi pilot untuk produksi produk olahan makanan berbahan baku mangrove," ungkapnya.

Dalam kegiatan itu, Poklahsar Wana Lestari Badung dipilih sebagai peserta pelatihan karena dianggap cukup berhasil dalam mengolah mangrove sebagai produk olahan sirup mangrove sehingga perlu diberikan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam mengolah produk olahan turunan mangrove sebagai produk dengan ciri khas dan cita rasa yang baik.

Nyoman Suardana berharap, hasil produksi olahan makanan berbahan baku mangrove dapat menjadi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar sekaligus mempertahankan kelestarian ekosistem mangrove yang ada melalui pemanfaatan buah dan daun mangrove tanpa melakukan perusakan dan pengebangan mangrove. (adv)

Badung Pasang "Pojok Wi-Fi" Pada 33 Titik Objek Wisata

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, memasang "Pojok Wi-Fi" yang bisa diakses secara gratis pada 33 titik objek wisata sebagai salah satu persiapan menyambut pemulihan industri pariwisata.

"Untuk meningkatkan kualitas objek pariwisata dan untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Badung, kami sudah melakukan pemasangan Wifi Corner di 33 site objek wisata," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Badung IGN Jaya Saputra dalam keterangan Humas Badung di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan industri pariwisata sebagai salah satu industri dinamis yang harus selalu mendapatkan sentuhan dan pembaruan salah satunya dengan pemasangan jaringan fasilitas internet gratis tersebut.

Menurut Jaya Saputra, apabila objek wisata memiliki jaringan in-

ternet gratis dengan kualitas yang baik, tentu akan menambah rasa nyaman bagi wisatawan, karena saat ini gaya hidup masyarakat dunia yang tidak terlepas dari penggunaan media sosial seperti dengan mengunggah aktivitas yang mereka lakukan ke media sosial.

Selain itu, pihaknya melihat fenomena penggunaan media sosial oleh masyarakat tersebut sebagai peluang untuk melakukan promosi secara gratis khususnya promosi dalam sektor pariwisata yang memiliki dampak besar

"Wisatawan yang mengunjungi objek wisata di Badung tentu akan mengabadikan setiap momen liburannya dan diunggah di media sosial. Nah secara tidak langsung mereka sudah ikut mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Badung ke dunia luar," katanya.

Selain memasang "Wi-Fi Corner" di objek wisata, pihaknya

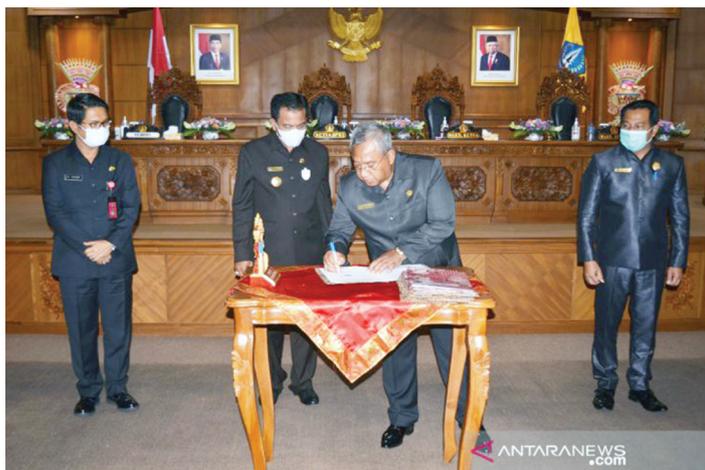


Kadis Kominfo Badung IGN Jaya Saputra. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

juga memasang fasilitas tersebut di pasar. Hal itu dilakukan sebagai salah satu inovasi untuk menciptakan startup baru dan e-commerce dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Kami terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ditengah pandemi, salah satunya dengan memasang Wi-Fi Corner gratis guna mendorong pedagang pasar melakukan pemasaran berbasis daring," ungkap Jaya Saputra. (adv)

APBD Kabupaten Badung 2021 Ditarget Rp3,8 triliun



Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung, Selasa (24/11). Antara/HO-Humas Badung/fik

RAPAT Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Bali, menetapkan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan perubahan dari rancangan sebelumnya sebesar Rp4,3 triliun lebih, menjadi Rp3,8

triliun lebih atau turun sebesar Rp536 miliar lebih.

"Target pendapatan dan belanja daerah yang dirancang pada APBD 2021 telah realistis dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal saat ini," ujar Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana

saat Rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa.

Rapat paripurna itu, mengendahkan penetapan lima Ranperda menjadi Perda yang dituangkan dalam penandatanganan persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD bersama Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.

Kelima Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda yaitu, Ranperda tentang APBD Badung Tahun Anggaran 2021, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara tahun 2020-2040, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Mangutama.

Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal

Daerah pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana.

Ketut Lihadnyana mengatakan, dengan disetujuinya Ranperda tersebut, berarti pihaknya bersama telah sepakat dan bertanggung jawab atas seluruh substansi yang terkandung dalam dokumen dimaksud terutama terkait rancangan APBD Badung 2021, yang memuat target anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas program, kegiatan dan sub-kegiatan beserta anggarannya.

Menurutnya, selama proses pembahasan rancangan APBD 2021, muncul pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif yang berimplikasi pada penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, terutama pendapatan asli daerah sebagai akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada drastisnya penurunan penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah tahun 2021. (adv)

Badung Harapkan Dukungan Pengelolaan Dana Desa dari DPR

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung, Bali, Komang Budi Argawa mengatakan, pihaknya berharap dukungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa dari Komisi V DPR RI.

"Kami mengharapkan dukungan Komisi V DPR RI dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa dalam mengembangkan BUMDes karena terbukti mampu meningkatkan nilai tambah produk, diversifikasi usaha dan penyerapan tenaga kerja serta mendorong desa di Badung menjadi kawasan perekonomian andalan di masa depan," ujar Komang Budi Argawa saat menerima Kunjungan Kerja (Kunja) Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Kamis.

Ia mengatakan pemanfaatan Dana Desa dalam pengelolaan BUMDes dan pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

"Karena keberadaan BUMDes dan desa wisata mampu memberdayakan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf perekonomian masyarakat," katanya.

Komang Budi Argawa menambahkan, pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Badung itu. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap pembangunan di daerah, sekaligus menjangkau aspirasi daerah terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI selaku ketua tim rombongan kunker, Ridwan Bae mengatakan BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintahan desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Menurutnya, BUMDes juga memiliki peran strategis dalam



Kadis PMD Badung Komang Budi Argawa saat menerima Kunja Komisi V DPR RI Spesifik di Desa Kutuh, Kuta Selatan Kabupaten Badung, Kamis (26/11). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ekonomi desa.

"Selain itu, BUMDes membantu pemerintahan desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manu-

sia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi, serta membantu penyerapan tenaga kerja di tengah pandemi COVID-19," katanya. (adv)

TPID Badung Gagas Rakor TPID Se-Bali



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) membuka Rakor TPID Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (25/11). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Bali, menggagas pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TPID kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang membahas topik Pemetaan Surplus Defisit Produksi dan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah.

"Topik ini dipilih karena hampir setiap daerah belum

mampu memenuhi kebutuhan bahan pangannya dari produksi sendiri, sehingga diperlukan adanya kerja sama antardaerah," ujar Ketua Panitia Rakor TPID, A.A Ngr. Bayu Kumara Putra di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, sejauh ini, ada beberapa daerah yang sudah menjalankan kerja sama antar daerah, namun juga ada

juga yang belum. Selain itu, ada daerah yang sudah melakukan kerja sama namun belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.

"Untuk itu, melalui forum ini diharapkan kami dapat membahas bersama-sama, sehingga kerja sama antar daerah dapat dilaksanakan secara optimal," katanya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan, pihaknya sependapat dengan adanya kerja sama antar daerah yang dilakukan dalam upaya peningkatan dan pemenuhan kebutuhan produksi pangan.

"Kami sangat mendukung langkah kerjasama antar daerah ini, sehingga nantinya mampu menekan gejala harga kebutuhan pokok di pasaran. Untuk itu, diperlukan sinergitas antar daerah untuk menekan angka inflasi dan dapat menjamin tidak ada kelangkaan produksi

yang menjadi kebutuhan kami di setiap daerah," ujarnya.

Selain itu, menurutnya rapat koordinasi tersebut, merupakan langkah yang sangat tepat dan strategis di tengah-tengah kebutuhan akan produksi pertanian dan peternakan di Bali dan di Badung khususnya yang cukup tinggi.

Sebagai destinasi pariwisata, ia menjelaskan bahwa Bali dan Badung memiliki konsekuensi yang begitu besar dalam memenuhi kebutuhan pangan dari produksi pertanian dan peternakan.

"Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap produksi-produksi yang ada di Bali maupun di Badung. Kami berharap apa yang menjadi kendala dalam pertemuan ini dapat segera teratasi dan inflasi di Bali bisa ditekan serendah mungkin," ungkap Sekda Adi Arnawa. (adv)

Gianyar Pertahankan Opini WTP Enam Kali Berturut-turut

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali, secara berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 yang merupakan opini WTP yang keenam kalinya.

“Dari pengamatan kami selama setahun, Gianyar memang paling baik. Kinerja Pemkab Gianyar memang luar biasa. Ini prestasi. Tidak mudah mempertahankan dengan kriteria yang semakin bertambah” kata Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Bali, Tri Budhianto, setelah menyerahkan penghargaan kepada Bupati Gianyar I Made Mahayastra, melalui keterangan tertulis, Rabu.

Saat menerima penghargaan, Bupati Gianyar didampingi Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta dan Sekda Kab Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya. Selain menerima piagam penghargaan, Pemkab Gianyar juga menerima

Plakat WTP karena telah mampu mempertahankan Opini WTP selama lebih dari lima kali berturut-turut.

Tri Budhianto pada kesempatan tersebut menyatakan apresiasinya pada Pemkab Gianyar karena telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK selama enam kali berturut-turut.

Hal ini, kata dia, tidak mudah. Apalagi dari tahun ke tahun tantangan dan kriteria dari WTP itu semakin berat dan kini pemeriksaan BPK tidak hanya fokus pada laporan keuangan saja, tapi sudah merambah ke kinerja.

Ia menegaskan predikat WTP itu bukan jaminan tidak ada korupsi. Tetapi mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan peraturan yang ada sehingga berdampak pada pembangunan di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemkab Gianyar



Bupati Gianyar I Made Mahayastra menerima penghargaan dari Tri Budhianto, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali (Foto Humas Gianyar)

mempertahankan Opini WTP atas LKPD secara enam kali berturut-turut.

Ia menyebut hal ini tidak terlepas dari arahan dan pendampingan Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Provinsi Bali sehingga penyaluran dana perimbangan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kita tidak langsung berpuas diri. Tetapi, kita harus mampu meningkatkan kinerja sehingga apa yang kita kerjakan harus betul-betul bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mahayastra. **(ant)**

Puluhan Miliar, Gianyar jadi Kabupaten Pertama Cairkan Hibah Pariwisata



Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyerahkan bantuan hibah pariwisata kepada pelaku usaha hotel dan restoran (Foto Humas Gianyar)

GIANYAR, salah satu kabupaten di Provinsi Bali, menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mencairkan hibah pariwisata kepada 160 wajib pajak hotel dan restoran dengan nilai hibah mencapai puluhan miliar.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra dalam siaran pers Dis-

kominfo Gianyar yang diterima di Gianyar, Selasa, menjelaskan dari 583 hotel dan restoran yang lolos verifikasi, 160 diantaranya sudah ditransfer dana hibah. Dengan total nilai sekitar Rp40 miliar lebih yang masuk ke rekening masing-masing hotel.

“Penerima dana hibah

terbesar yakni Hotel Mandapa A Ritz Carlton, yang berada di Kedewatan, Ubud, mendapatkan Rp3,44 miliar. Sedangkan kategori restoran penerima dana hibah tertinggi adalah Four Seasons Resort di Desa Sayan, Kecamatan Ubud senilai Rp1,4 miliar,” ujar Mahayastra.

Ia menjelaskan penyerahan bantuan hibah yang diberikan di Rumah Luwih Desa Lebih, kecamatan Blah Batu, Gianyar, Senin (16/11), dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

“Pemkab Gianyar sudah cairkan dana hibah pariwisata dan sudah masuk rekening hotel dan restoran. Jumlahnya di atas Rp40 miliar. Jadi ini sudah mendekati 50 persen. Tinggal SPJ, kita akan percepat lagi pencairan tahap kedua. Sehingga tuntas, Rp135 miliar bisa dicairkan pada yang berhak menerima,” kata Mahayastra.

Ia mengharapkan dana hibah pariwisata ini bisa dipergunakan

dengan baik untuk biaya operasional usaha seperti, bayar listrik, gaji pegawai, perbaikan hotel dan lain-lain. “Saya yakin hibah akan sangat membantu bagi pengusaha,” ujarnya.

Bupati menegaskan tidak ada skala prioritas dalam pencairan dana hibah. “Yang dapat Rp1 juta pun, kalau sudah penuh syarat pasti kita transfer,” ujar Mahayastra.

Menurut dia, pemberian dana hibah ini dapat membuat pelaku usaha hotel dan restoran bisa bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang apalagi industri pariwisata telah terdampak parah oleh adanya pandemi.

“Karena tidak dipungkiri, perusahaan besar dengan jumlah karyawannya di atas 800 orang akan sulit bertahan di situasi sulit ini. Kita berharap mereka bisa bertahan beberapa bulan lagi, karena situasi pasti akan normal kembali sehingga bisa eksis kembali,” katanya. **(ant)**

Kejari Karangasem Ajak Masyarakat Taati Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Kejaksanaan Negeri Kabupaten Karangasem mengajak masyarakat Karangasem untuk menaati protokol kesehatan saat pelaksanaan Pilkada.

Keterangan tertulis dari Humas Pemkab Karangasem yang diterima, Selasa, menyebutkan Kejari melakukan sosialisasi Protokol kesehatan dan Pilkada Damai itu dengan memasang Baliho di kabupaten setempat, Senin (16/11) lalu.

"Masyarakat akan lebih mudah ingat dan akan selalu melihat imbauan agar warga tetap menjaga kamtibmas menjelang pelaksanaan hingga Pilkada digelar, apabila mereka masuk wilayah Kabupaten Karangasem, pasti akan melihat baliho ini, sebab terpasang tepat di sisi jalan raya," kata Plt Kejari Karangasem Aji Kalbu Pribadi.

Pemasangan baliho imbauan tersebut dilakukan di beberapa

lokasi yang dianggap strategis, ramai dan mudah diakses, sehingga dapat dibaca oleh masyarakat. Menurut dia, ada 20 titik pemasangan baliho, diantaranya 10 Baliho berisi ajakan menyukseskan Pilkada dan 10 Baliho imbauan pemakaian masker yang benar dan baik.

"Kami tidak mau melanggar titik - titik yang memang tidak diperbolehkan memasang baliho, jadi sebelumnya telah kami koordinasikan dengan Satpol PP," ujar Plt Kejari Karangasem saat bertemu Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta.

Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta mengapresiasi langkah Kejari Karangasem dalam rangka menyukseskan Pilkada 2020 di Kabupaten Karangasem.

Sedana Merta mengatakan,



Plt Kejari Karangasem Aji Kalbu Pribadi saat bertemu Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta untuk membahas persiapan Pilkada Karangasem 2020 di kantornya, Senin (16/11/2020). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Karangasem/2020)

dari Birokrasi, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah, pasti akan mengawal dan mendukung agar Pilkada ini aman dan berlangsung dengan baik sehingga menghasilkan Pemimpin yang baik 5 tahun ke depan.

Ia juga mengingatkan agar pesta rakyat ini tetap mengede-

pankan Protokol kesehatan. Jangan sampai hajatan politik ini menjadi klaster baru.

"Walaupun Kabupaten Karangasem masuk zona hangat, kami yakin, masyarakat Karangasem sudah cerdas dan Pilkada dapat berjalan dengan tertib, aman dan terkendali," katanya. (ant)

BKKBN Bali Gerakkan Kader untuk Sosialisasikan 3M di Karangasem



Sosialisasi protokol kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19 dan BKKBN Bali, di Karangasem, Kamis (19/11/2020). ANTARA/HO-Humas Karangasem. (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2020)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggerakkan 75 kader dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan 3 M untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menghindari kerumunan dan menjaga jarak minimal 1 meter.

"Keluarga menjadi sentral

utama dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam penanganan COVID-19, kepatuhan anggota keluarga dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpengaruh besar dalam menekan dampak pandemi COVID-19," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta saat membuka sosialisasi kader BKKBN itu sebagaimana keterangan pers yang

diterima, Kamis.

Menurutnya, keluarga berperan penting melindungi, memberikan sosialisasi, dan mengajarkan anggota keluarganya untuk selalu memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

Kader yang digerakkan tersebut terdiri dari unsur petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) sebanyak 75 orang. Selain itu ada unsur sub PPKBD dan masyarakat sebanyak 300 orang.

Para kader nantinya akan bertugas untuk melakukan sosialisasi perubahan perilaku 3 M yang sasaran utamanya adalah lingkup keluarga, sehingga diharapkan penyebaran COVID-19 bisa berkurang.

Penggerakkan kader ini sekaligus membantu menekan angka pasien yang positif di wilayah Karangasem. Hingga saat ini jumlah kasus konfirmasi positif di Kabupaten Karangasem tetap

1.001 kasus. Dengan rincian 978 kasus atau 97,70 persen merupakan kasus transmisi lokal dan 23 atau 2,30 persen merupakan kasus yang berasal dari PPLN (pelaku perjalanan luar negeri).

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Sosialisasi Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Dr Dwi Listyawardani, mengatakan BKKBN telah mengerahkan ribuan petugas lapangan untuk mensosialisasikan gerakan 3 M.

"Untuk di Provinsi Bali sendiri sosialisasi dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Karangasem dan Gianyar dengan menggerakkan sebanyak 750 tenaga yang terdiri dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader kelompok kegiatan dan mitra kerja," katanya.

BKKBN bersama Satgas Penanganan COVID-19 akan melaksanakan program penguatan pencegahan COVID-19 bagi individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai saluran dan pendekatan. (ant)

Pemkab-HSNI Tabanan Bantu Beras kepada 1.149 Nelayan Terdampak COVID-19

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan, Bali, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HSNI) Tabanan, menyalurkan bantuan Beras Sehat dari CSR perbankan kepada 1.149 nelayan setempat yang terdampak COVID-19.

Ketua DPC HSNI Tabanan, I Ketut Arsana Yasa di Tabanan, Kamis, mengatakan pemberian bantuan ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nelayan akibat dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tabanan.

Untuk meringankan beban kondisi ekonomi para nelayan ini, pihaknya sebulan yang lalu bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk dapat membantu para nelayan yang terdampak COVID-19.

"Akhirnya, Pemkab Tabanan membantu beras 5 kilogram untuk per satu orang nelayan berikut hand sanitizer dan masker melalui CSR perbankan," ujarnya.

Ribuan nelayan itu ada sebanyak 82 kelompok nelayan yang tersebar pada enam kecamatan mulai dari Kediri, Tabanan, Kerambitan, Selemadeg, Selemadeg Timur, dan Selemadeg Barat. Jumlah itu ada 12 desa pesisir dengan total nelayan sebanyak 1.149 orang.

"Semoga dengan adanya bantuan stimulus bisa mengurangi beban mereka, dan menguatkan semangat nelayan menghadapi pandemi COVID-19," katanya.

Arsana Yasa mengaku di tengah Pandemi COVID-19, DPC HSNI selalu berusaha dan berupaya membantu nelayan dan berupaya melancarkan hasil tangkapan nelayan supaya bisa membantu pendapatan nelayan dan menambah ekonomi mereka.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan menerima bantuan CSR dari Bank BPD Bali yang disampaikan melalui Kepala Cabang BPD Tabanan berupa 3.000 paket beras untuk disalur-



Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HSNI) Tabanan, menyalurkan bantuan Beras Sehat dari CSR perbankan kepada 1.149 nelayan setempat yang terdampak COVID-19. ANTARA/HO-HSNI Tabanan/2020

kan kepada petani dan nelayan yang terdampak COVID-19 dan bencana alam di kabupaten setempat.

Bantuan berupa 3.000 paket beras yang per paket masing-masing 5 kg beras itu diserahkan secara langsung oleh Kepala Cabang BPD Tabanan I Gusti Ngurah Supardi kepada Sekda I Gede Susila di lobi depan kantor Bupati Tabanan.

"Saya mewakili Bupati Tabanan mengucapkan terima kasih kepada BPD Bali melalui Kepala Cabang BPD Tabanan, yang terus membantu masyarakat kami. Jadi, masyarakat sudah dibantu melalui Pemda Tabanan, baik dari sisi kesehatan dengan bantuan untuk rumah sakit, sembako juga, termasuk APD untuk petugas dan masyarakat kita. Hari ini dalam bentuk beras," katanya. **(ant)**



Para petani di kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung menunjukkan kartu BPJamsostek setelah resmi terdaftar sebagai peserta (Foto Humas)

SEBANYAK 2.186 petani di Kabupaten Bangli dan 4.225 Kabupaten Klungkung, Bali sehingga totalnya 6.411 petani resmi terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

"Jaminan sosial yang diberikan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja dalam menghadapi risiko sosial yang terjadi, termasuk para petani," kata Kepala BPJamsostek Bali Gianyar, Bimo Prasetyo, dalam siaran persnya di Bangli, Jumat.

Bimo mengatakan BP-

JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh pemerintah, terus memberikan pelayanan terbaiknya melalui semangat layanan prima untuk memastikan seluruh peserta dan keluarga mendapatkan haknya atas risiko sosial yang terjadi.

Penyerahan kartu secara simbolis ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor BPJamsostek Bali Gianyar, Bimo Prasetyo dan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Bangli, I Wayan Sarma serta para tenaga

6.411 Petani di Klungkung dan Bangli ikuti BPJamsostek

kerja yang berprofesi sebagai petani.

Selain penyerahan dilakukan pula sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah peserta yang terdaftar itu.

Penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJamsostek diberikan kepada perwakilan petani di Halaman Depan Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Bangli beberapa waktu lalu.

Sementara itu, penyerahan simbolis juga dilakukan di Kabupate Klungkung, tepatnya di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Klungkung yang diserahkan langsung oleh Sekda Kabupaten Klungkung, I Gede Putu Winastira yang mewakili Bupati Kab. Klungkung.

Sementara itu, Sekda Klung-

kung, I Gede Putu Winastira mengatakan, "Pada intinya pemerintah Klungkung menyambut baik program ini karena sangat sejalan dengan visi misi, khususnya misi ketiga. Namun demikian, kami berharap agar masyarakat yang sudah terdaftar untuk rutin membayar secara berkelanjutan agar selalu dilindungi oleh program BPJAMSOSTEK", ungkap Putu.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Bangli, I Wayan Sarma mengungkapkan terimakasih kepada BPJamsostek karena telah peduli terhadap para petani di Kab. Bangli. Ia juga berharap agar masyarakatnya terus melanjutkan program ini dengan membayar iuran rutin sehingga selalu terlindungi oleh program BPJamsostek. **(ant)**

Wisata di Buleleng Terapkan Tiket Elektronik

DAERAH Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Buleleng, Bali, mulai menerapkan sistem tiket elektronik (E-Ticketing) sebagai salah satu upaya mengikuti Protokol Kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana di Singaraja, Jumat, mengatakan program E-Ticketing ini bisa menjadi salah satu upaya optimalisasi dan transparansi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk peningkatan PAD dari sektor bagi hasil retribusi pelayanan tempat pariwisata.

“Untuk transparansi dan efisiensi, hal seperti ini harus terus kita lakukan di objek wisata di Buleleng,” kata Bupati setelah menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemkab Buleleng dengan BPD Bali mengenai penerapan tiket elektronik di DTW Air Panas Desa Banjar, Kecamatan Banjar.

DTW pertama yang akan melaksanakan sistem E-Ticketing ini adalah Air Panas Banjar Desa Banjar, Kecamatan Banjar.

Air Panas Banjar adalah satu dari 10 DTW yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Buleleng untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng, melalui bagi hasil retribusi pelayanan tempat pariwisata.

Selama ini, Air Panas Banjar menjadi penyumbang terbesar dari 10 DTW. Seperti 2019, contohnya, DTW ini menyumbangkan bagi hasil retribusi sebesar Rp1.983.780.000. Sementara di tahun 2020 ditarget untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp754 juta. Sementara sampai dengan bulan Oktober 2020, baru terealisasi Rp373.850.000.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menjelaskan, di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini Kabupaten Buleleng masih belum bisa menggantungkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Restaurant (PHR). “Saat ini, tingkat hunian dan kedatangan wisatawan masih belum maksimal,” kata Bupati.



Dokumentasi. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2020)

Untuk itu, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Buleleng harus melakukan inovasi dengan merancang sebuah program kegiatan yang mampu memberikan dampak kepada masyarakat dan juga pemerintah. “Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sebuah inovasi,” kata Bupati.

Pemberlakuan E-Ticketing, lanjut Bupati Suradnyana, bisa menjadi sebuah jawaban terhadap belum pulihnya sektor pariwisata. “Hanya saja, selain mengejar retribusi, Pemerintah juga harus melakukan sejumlah perbaikan akses dan fasilitas pada DTW untuk mampu mendatangkan wisatawan,” ujarnya. (ant)

Saat Terima Bantuan, Warga Jembrana Diminta Terapkan Protokol Kesehatan



Bupati Jembrana I Putu Artha menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Mendoyo, serta berpesan untuk menerapkan protokol kesehatan, Kamis (19/11). (AntaraneWS Bali/Humas Jembrana/2020)

SAMBIL terima bantuan sembilan kebutuhan pokok, warga Kabupaten Jembrana, Bali diminta untuk menerapkan protokol kesehatan sehari-hari.

“Sebelum vaksin bisa digunakan, pencegahan penularan Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya minta seluruh masyarakat menerapkan hal tersebut,” kata Bupati Jembrana I Putu Artha, saat menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan warga di Kecamatan Mendoyo, Kamis.

Ia mengatakan, bantuan kebutuhan pokok itu berasal dari anggaran pemerintah pusat, yang diberikan kepada Kabupaten Jembrana karena dianggap bisa mengendalikan penularan Covid-19.

Menurut dia, hadiah dari pemerintah pusat itu tidak mungkin bisa dicapai pihaknya,

tanpa bantuan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Pemerintah pusat menilai masyarakat Jembrana disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga diganjar dengan bantuan ini,” katanya.

Ia mengungkapkan, bantuan sosial yang diterima salah satunya berupa sembilan kebutuhan pokok sebanyak 55.667 paket, yang tujuannya untuk membantu masyarakat di tengah pandemi saat ini.

Kepala Dinas Sosial Jembrana Made Dwipayana mengatakan, Pemkab Jembrana mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp14,9 miliar, dengan Rp8,3 miliar diantaranya digunakan untuk memberikan bantuan sembilan kebutuhan pokok tersebut. (ant)

Undiksha Hadirkan Jero Jemiwi dalam Webinar

UNIVERSITAS Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, menghadirkan Jero Jemiwi, seorang life coach, hypnotherapist, lectures dan trainer, dalam webinar untuk berbagi ilmu dan memberi motivasi kepada mahasiswa, terutama dalam mengembangkan dan menguatkan kemampuan softskill mahasiswa.

"Webinar ini diadakan agar mahasiswa dapat mengembangkan bentuk-bentuk kompetensi dalam bentuk softskill, bagaimana mahasiswa bekerja sama, berkolaborasi atau yang lain," kata Wakil Rektor Undiksha Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., saat membuka webinar, Jumat.

Suastra mengatakan, webinar yang diikuti seratusan mahasiswa ini menghadirkan narasumber Jero Jemiwi, seorang life coach, hypnotherapist, lectures dan trainer.

"Kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman

sangat kami apresiasi," kata perempuan yang juga pernah sebagai pramugari ini.

Ia mengharapkan dapat memberikan motivasi untuk mahasiswa, khususnya dalam menghadapi tantangan di era new normal sebagai imbas pandemi COVID-19.

"Dalam pandemi ini, mahasiswa banyak mengalami kesulitan, salah satunya dalam perkuliahan. Bagaimana caranya agar tidak menyerah dengan keadaan. Ini perlu motivasi, salah satunya melalui webinar ini," katanya.

Menurut Suastra, di tengah persaingan yang semakin ketat, kemampuan softskill harus dimiliki oleh mahasiswa.

"Yang penting tidak hanya kemampuan akademik. Tapi juga kemampuan akademik. Bagaimana kita bisa menjadi orang bertanggung jawab," imbuh wakil rektor yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Undiksha ini.

Sementara itu, Jero Jemiwi mengatakan tantangan dalam era



Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali, menghadirkan Jero Jemiwi, seorang life coach, hypnotherapist, lectures dan trainer, dalam webinar untuk berbagi ilmu dan memberi motivasi kepada mahasiswa, yang dibuka Wakil Rektor Undiksha Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd., di kampus setempat, Jumat (20/11/2020). (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2020)

new normal tidak dapat dihindari. Setiap orang akan menemui itu, termasuk oleh mahasiswa. Hanya saja memungkinkan adanya perbedaan. "Misalnya mahasiswa yang tinggal di kos dan yang tinggal di rumah, tentu tantangannya berbeda," katanya.

Tantangan tersebut, kata Jero Jemiwi, tidak dapat dihindari karena tetap ada sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Namun demikian, diyakini ada cara untuk mengatasi, yaitu melalui diri sendiri atau yang ia sebut sebagai selflove. (ant)

Untung Jutaan/Bulan selama COVID-19, Perajin Rotan di Denpasar Fokus Layani Masyarakat Lewat "BRILink"



Warga melakukan transaksi keuangan di Agen BRILink Anwar Rotan di kawasan Pulau Bungin, Kota Denpasar, Bali. Antaranews Bali/Naufal Fikri

SEORANG perajin rotan yang juga agen Brilink di Kota Denpasar, Bali, Anwar Yasin Effendi, mengaku fokus melayani transaksi masyarakat lewat "BRILink Anwar Rotan" yang dikelolanya sebagai mata pencaharian utama selama pandemi COVID-19, karena bisa melayani 150 transaksi dalam sehari dengan keuntungan hingga jutaan per-bulan.

"Saya sebenarnya sudah

sekitar enam tahun menjadi agen BRILink sambil tetap memproduksi kerajinan rotan. Namun karena COVID-19, sementara produksi kerajinan rotan saya hentikan dulu, dan sekarang yang menopang kehidupan saya ya dengan menjadi agen BRILink ini," ujar Anwar Yasin Effendi di kawasan Jakan Pulau Bungin, Denpasar, Senin.

Selama masa pandemi, agen

BRILink Anwar Rotan mampu melayani transaksi hingga 4.500 transaksi setiap bulannya. Dalam sehari, rata-rata ada sekitar 150 transaksi keuangan masyarakat yang dilayani.

Anwar mengaku, selama ini transaksi yang paling banyak dilayani adalah transfer uang, berbagai jenis pembayaran seperti listrik, BPJS, top up uang elektronik serta cicilan finance.

Ia menjelaskan, capaian selama masa pandemi itu masih tergolong tinggi meskipun sebenarnya juga mengalami penurunan nilai transaksi selama masa pandemi. Sebelumnya, saat normal sebelum COVID-19, Anwar Rotan mampu melayani hingga 7.000 transaksi setiap bulan.

"Selama pandemi ini saya masih bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp7 juta setiap bulan. Sebelum pandemi rata-rata Rp15 juta per bulan. Pernah juga mencapai puluhan juta

dalam satu bulan," ungkapnya.

Catatan transaksi tersebut membuat Anwar Rotan menjadi salah satu agen BRILink dengan transaksi tertinggi di BRI Kanwil Denpasar. Pada tahun 2019, Anwar Rotan juga dinobatkan sebagai Agen BRILink dengan kategori Transaksi tertinggi peringkat 13 se-Indonesia.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah BRI Denpasar Ida Bagus K. Subagia menjelaskan agen BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan konsep sharing fee.

Menurutnya, program BRILink mampu mendekatkan perbankan ke tengah masyarakat dengan outlet perbankan yang dikelola pihak ketiga atau masyarakat mirip bank mini yang dapat menjadi sumber penghasilan bagi agennya. (ant)

BI Bali Gandeng TNI AL Didik Jiwa Kepemimpinan Mahasiswa GenBI

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menggandeng Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar untuk melatih jiwa kepemimpinan bagi para mahasiswa yang tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Bali.

“GenBI Leadership Camp 2020 ini memang dilaksanakan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kali ini kami bersinergi dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat membuka kegiatan tersebut, di Denpasar, Kamis.

Oleh karena itu, ia mengharapkan para GenBI yang merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali yang telah memperoleh beasiswa tersebut agar menjadikan kegiatan GenBI Leadership Camp sebagai “Sekolah Kepemimpinan”.

“Kami berupaya berperan aktif dalam peningkatan kualitas masa depan sumber daya manusia Indonesia melalui program pem-

berian beasiswa bagi mahasiswa,” ucapnya.

Pada 2020, Bank Indonesia menyalurkan beasiswa kepada 225 orang mahasiswa-mahasiswi jenjang sarjana (S1) reguler di dua PTN mitra kerja sama yaitu Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha serta dua PTS yaitu Universitas Pendidikan Nasional dan Universitas Warmadewa. Pada tahun ini juga dilakukan perluasan penyaluran beasiswa pendidikan vokasi di SMK Dwijendra.

“Kalian adalah pemilik masa depan. Kalian merupakan contoh dari generasi muda yang cerdas, berprestasi dan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Dana beasiswa yang kalian dapatkan haruslah diman-



Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat membuka kegiatan GenBI Leadership Camp 2020 (Antara/HO-BI Bali/2020)

faatkan secara baik, benar dan bertanggung jawab,” ucapnya.

Trisno mengharapkan para mahasiswa dapat semakin memacu semangatnya terus berinovasi dan menunjukkan kualitas terbaik dalam diri sehingga dapat menjadi lulusan dan kader terbaik yang dapat membangun potensi daerah.

“Bank Indonesia juga telah

menyiapkan komunitas untuk berkarya, mengabdikan dan berkontribusi untuk negeri. Kalian bisa mengasah berbagai macam kecerdasan, mengoptimalkan berbagai bakat dan potensi kepemimpinan. Salah satu wadah pembinaan itu adalah yang kalian ikuti saat ini, yaitu GenBI Leadership Camp,” ucapnya. (ant)

PLN Peduli Bantu Gerakkan Usaha “Crafting” di Desa Sidetapa



PLN Peduli bantu gerakan usaha “Crafting” di Desa Sidetapa, Buleleng. (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2020)

PLN UID Bali dalam program PLN Peduli memberikan bantuan untuk menggerakkan usaha kerajinan atau crafting di Banjar Dinas Bantas, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Manajer Komunikasi PLN UID Bali, Made Arya dalam siaran pers

yang diterima, Rabu, menyebutkan bisnis crafting atau kerajinan saat ini mulai banyak dilirik oleh anak muda, sebab bisnis crafting diyakini lebih menjanjikan, dan Desa Sidetapa memang di kenal dengan produk kerajinan anyaman bambunya.

Ia mengatakan bahkan sebagian besar masyarakat Desa Sidetapa setiap harinya bekerja sebagai perajin, baik produksi kerajinan anyaman bambu lokal maupun anyaman bambu kreatif. Bagi masyarakat Sidetapa bergelut dengan bambu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Maka tidak heran bila banyak masyarakatnya yang lihai menyulap bambu menjadi barang yang indah dan unik.

Arya menjelaskan rata-rata masyarakat di desa ini masih bisnis rumahan (home industry), dengan pengerjaan manual tanpa peralatan yang canggih. Dari sinilah, PLN Peduli merangkul masyarakat Sidetapa dengan memberikan sebuah ide usaha crafting hingga akhirnya Komang Rena, Wayan Ariawan, Putu Sudi Karya menggagas kelompok usaha yang diberi nama Corner Bamboo Handicraft yang diresmikan pada 1 Oktober 2020. Saat ini, kelompok usaha tersebut

beranggotakan 40 orang.

Tak hanya sebuah ide yang diberikan, tetapi PLN Peduli juga memberikan bantuan dana sebesar Rp80 juta di tahun 2020. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk pembelian alat-alat kerajinan, penataan showroom artshop, pembelian bahan baku, pembelian kursi, meja, sound system, LCD proyektor untuk penunjang sarana dan prasarana pelatihan, baik desain maupun motif yang akan di produksi.

“Bantuan ini kami persembahkan kepada masyarakat Sidetapa untuk memiliki fasilitas produksi peralatan kerja yang memadai, serta memiliki tempat pemajangan produk atau artshop untuk hasil produksi barang. Selain itu juga agar dapat menciptakan tenaga kerja untuk pembuatan produk-produk baru yang telah di pasarkan, serta mampu bersaing dengan produksi pengrajin lainnya,” ujarnya. (ant)